

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Rahayu Santosa, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta.
- Basuki, Sulistiyo, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Wisya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2015, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, USAID, The Asia Foundation, Kemitran, Jakarta.
- Ishaq, H., 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Latif, H. Abdul, dkk, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Sofmedia, Jakarta.
- Taufani, Suteki dan Galang, 2020, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, Yappika, Malang.

A. ARTIKEL JURNAL

- Abadi, Suwarno, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No.3, 2015.
- Amalia, Mia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2011.
- Baroroh, Hani Barizal, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No.1, 2012.
- Heryanto, Budi, dkk, “Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, No.1, Juni 2020.
- Ipakit, Ronaldo, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No.2, 2015.
- Lattan, Artji Judiohrs, “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12, No.1, 2014.
- Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No.2, 2016.
- Setiawan, Dhevid , “Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. II, No. 1, 2018.
- Situmorang, Nedi Gunawan, “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* sebagai Alat Bukti yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. VI, No. 2, 2020.
- Suari, Ni Made Elly Pradnya, dkk, “Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. I, No. 1, Agustus 2020.
- Suprantio, Steven, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “*Testimonium De Auditu*” dalam Peradilan Pidana: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No.1, April 2014.
- Sayogie, Frans, “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Al-Turas*, Vol. 23, No.1, 2017.

B. TUGAS AKHIR

Aprilia Noorlaily, 2018, Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA/Plk), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, Palangkaraya.

Bawole, Grace Y., 2011, *Upaya Penanganan Kasus KDRT Berdasarkan Kitab KUHP dan Pasca Berlakunya UU 23 Tahun 2004*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2011.

Kristin Pebiyana, 2018, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak pada Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Sdn, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mila Istiqomah, 2019, Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nasution, Doli Aulia Kurnia, 2018, Kajian Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Erga Omnes dan Prospektif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 dan Nomor 026/PUU-III/2005 dalam Kaitannya dengan Pasal 58 UU MK), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.

C. INTERNET

Fanani, Estu Rakhmi, "UU PKDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya",
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=651:uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181,
diakses tanggal 9 September 2021 pukul 23.32 WIB.

Humas Bawaslu Kota Bogor, "Nalar Baru *Testimonium De Auditu* dan Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana Pemilu",
<https://bogorkota.bawaslu.go.id/nalar-baru-testimonium-de-auditudan-relevansinya-dengan-penegakan-hukum-pidana-pemilu/>,
diakses tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.52 WIB.

Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses tanggal 10 September 2021 pukul 00.28 WIB.

Purba, Yusty Riana, "Saksi Berantai (*Kettingbewijs*) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", *Yplawoffice*, <https://yplawoffice.com/2017/06/14/saksi-berantai-kettingbewijs-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses tanggal 6 Oktober 2021 pukul 15.05 WIB.

Ratnaningsih, Erna, "Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 11.38 WIB.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang peratifikasian *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang PKDRT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang peratifikasian *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 86/Pid.Sus/2018/PN. Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 180/Pid.Sus/2018/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 360/Pid.Sus/2018/PN Gns.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 91/Pid.Sus/2017/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 113/Pid.Sus/2019/PN Yyk.